



KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 465.3/34 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025, pada hari Sabtu tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sejumlah 39 KPM;

b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, hasil kesepakatan Musyawarah Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

17. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2025 sebesar 15% dari pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebanyak 39 KPM, daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa sebagaimana diktum KESATU meliputi:
- a. keluarga miskin yang bedomisili di Desa dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis; dan
 - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia dan/atau
 - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- KETIGA : Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan.
- KEEMPAT : Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyakeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 17 Desember 2024
KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO, SE.

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo
cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kab. Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;
3. BPD Desa Malangan di Malangan;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 465.3/34 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat RT/RW			Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Kriteria Penerima
1	2	3	4	5			6	7	8
1	SAMIDI	3311020805051824	3311023112610192	Dk Malangan	001	001	Pedagang	1	DTKS Miskin
2	NGATYEM	3311021805220004	3311057112790028	Dk Malangan	001	001	Wiraswasta	3	DTKS Sakit menahun
3	MUHAMAD LUTFI	3311021606200002	3671010901790007	Dk Malangan	002	001	Karyawan Swasta	1	Non DTKS Miskin
4	AGUS MA'SUM	3311021210160002	3213112808780001	Dk Malangan	002	001	Wiraswasta	4	DTKS Miskin
5	JIYEM	3311020805052945	3311027112580116	Dk Malangan	001	002	Pedagang	2	DTKS Lansia
6	JAMIYEM	3311020703090002	3311027112390073	Dk Malangan	001	002	Wiraswasta	1	DTKS Lansia
7	YAMTI	3311022407120003	3311027112270038	Dk Malangan	002	002	Petani	1	DTKS Lansia
8	TUKIYEM	3311020805053022	3311027112460006	Dk Malangan	002	002	Pedagang	1	DTKS Lansia
9	SUPRIYADI	3203041707170014	3203013010830008	Dk Malangan	003	002	Karyawan Swasta	7	DTKS Miskin
10	YULI WURIASIH	3311022501220006	3312114306840003	Dk Malangan	003	002	Karyawan Swasta	2	DTKS Miskin
11	YATYEM YATMO	3311020805052404	3311027112450133	Dk Malangan	001	003	Wiraswasta	1	DTKS Lansia

12	WAHYUNI	3311020805051863	3311024712680001	Dk Malangan	001	003	Pedagang	3	DTKS sakit Kronis
13	MARYONO	3311020510110003	3311022808680004	Dk Malangan	002	003	Wiraswasta	4	DTKS sakit Kronis
14	PARTINI	3311021503180002	3311025007600003	Dk Malangan	002	003	Swasta	1	DTKS Lansia
15	SUKIDI	3311030805053399	3311020410700003	Dk Gatak	001	004	Pedagang	1	DTKS Miskin
16	ADI RISKIAWAN	3311020211160001	3604052509650002	Dk Gatak	001	004	Pedagang	4	DTKS Miskin
17	SRIWI	3311020912190004	3311021912760001	Dk Gatak	002	004	Wiraswasta	4	DTKS Miskin
18	SUYATI	3311021912110006	3311027112490127	Dk Pundungsari	001	005	Buruh harian lepas	2	DTKS Lansia
19	SRI MULYONO	3311022106160003	3311020608790002	Dk Pundungsari	001	005	Buruh harian lepas	4	DTKS Miskin
20	BONO	3311020703240002	3311020403720002	Dk Pundungsari	002	005	Pedagang	2	DTKS sakit Kronis
21	TUKIRIN	3311020705052869	3311023112560047	Dk Pundungsari	002	005	Penjahit	1	Non DTKS sakit Kronis
22	KARSINI	3311020705050431	3311025710650001	Dk. Ngoro-oro	001	006	Wiraswasta	1	DTKS Miskin
23	RUBIYEM	3311020705050405	3311027112590058	Dk. Ngoro-oro	001	006	Pedagang	1	Non DTKS Miskin
24	WARNO WIYONO	3311022109210005	3212101507570001	Dk. Ngoro-oro	002	006	Pedagang	1	DTKS Miskin
25	SUPARMIN	3311020705050485	3311021206720005	Dk. Ngoro-oro	002	006	Pedagang	2	DTKS Miskin
26	SUPATMI	3311022809160001	3311035706740002	Dk Gunungsudo	003	006	Pedagang	2	DTKS Miskin
27	NGATEMI	3311020705051004	3311027112400032	Dk Gunungsudo	003	006	Pedagang	1	DTKS Lansia
28	PARMI	3524090401180001	3524094206630001	Dk Gunungsudo	001	007	Pedagang	1	Non DTKS Miskin
29	PONIYEM	3311020601150004	3311027112470035	Dk Gunungsudo	001	007	Petani	5	DTKS Lansia
30	SUHARNI	3311021909230001	3172034305630007	Dk Gunungsudo	002	007	Mengurus rumah tangga	1	Non DTKS Miskin
31	SETIANINGSIH	3673011302190009	3604014609900808	Dk Gunungsudo	002	007	Karyawan swasta	3	Non DTKS Miskin
32	PAIDI	3311020705051634	3311020809600001	Dk Gunungan	001	008	Pedagang	2	DTKS Miskin

33	KOMING AL BUHORI	3311020705051689	3509131606520004	Dk Gunungan	001	008	Petani	1	DTKS Lansia
34	MUSIYEM	3311020110140001	3311027112550044	Dk Gunungan	002	008	Pedagang	2	DTKS sakit kronis
35	SARNI	3311020705052175	3311025212580002	Dk Gunungan	002	008	Petani	5	DTKS miskin
36	TRI RAHAYU	3311021705180004	1671095108940005	Dk Gunungan	001	009	Karyawan Swatsa	3	DTKS Miskin
37	KASEMI	3311020705052252	3311024112610001	Dk Gunungan	001	009	Buruh	2	DTKS sakit kronis
38	PARYONO	3311022706240001	9271032810650001	Dk Gunungan	002	009	Buruh harian lepas	2	DTKS sakit kronis
39	SRI MULYATI	3311020705052202	3311025711780001	Dk Gunungan	002	009	Pedagang	1	DTKS miskin

Kepala Desa Malangan,

ttd

TUKIJO, SE.

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, di Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini Sabtu tanggal Empat belas bulan Desember Tahun 2024 di Balai Desa Malangan telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menetapkan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam rangka penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, Ketua RT, Ketua RW dan wakil-wakil masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah:

A. Materi atau Topik

1. Paparan Kepala Desa tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT.
2. Penyepakatan kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD.
3. Laporan hasil pendataan calon penerima BLT DD dan Pembahasan serta penyepakatan bersama calon keluarga penerima manfaat BLT DD Tahun 2025.
4. Pembahasan terkait Rencana Tindak Lanjut.
5. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber:

Pimpinan Rapat	: PAIMIN, S.Pd	dari Ketua BPD
Sekretaris/Notulis	: SUPRIYADI	dari Sekretaris BPD
Nara Sumber	: TUKIJO, SE.	dari Kepala Desa
	MARIMAN	dari Sekretaris Desa
	KRISHNA MURTI	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus ini, yaitu:

1. Tersampainya paparan Kepala Desa tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT Tahun 2025 sebesar Rp140.400.000 (Seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) kepada 39 KPM;
2. Disepakatinya kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD, yakni:
 - a. Kriteria BLT DD
 - 1) Calon penerima BLT DD keluarga miskin (KK) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Masuk di dalam daftar Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
 - b) Keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
 - c) Kehilangan mata pencaharian;
 - d) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - e) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH); dan/atau
 - f) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - 2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa harus berdomisili di Desa Malangan

- b. Mekanisme penyaluran
- 1) Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan dapat dilakukan secara tunai.
 - 2) Masa penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025
 - 3) Besaran BLT Desa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat setiap bulannya.
 - 4) Monitoring evaluasi dilakukan oleh BPD, Camat dan Inspektorat Daerah.
 - 5) Penanggung jawab BLT Desa adalah Kepala Desa.
3. Disepakati bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa TA 2025 Desa Malangan sebagaimana terlampir.
4. Disepakatinya rencana kerja tindak lanjut, sebagai berikut.
- a. Pengajuan pencairan pada Dinas terkait.
 - b. Kepala Desa segera menetapkan calon penerima BLT DD dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
5. Telah ditandatanganinya Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malangan, 14 Desember 2024

Pimpinan Rapat,

Notulis/Sekretaris,

ttd

ttd

PAIMIN, S.Pd.

SUPRIYADI

Mengetahui
Kepala Desa Malangan,

ttd

TUKIJO, SE.